



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XI**

Jalan Adhyaksa – Kayu Tangi Banjarmasin 70123

Telepon (0511) 3304583, 3304477

Laman : <https://lldikti11.kemdiktisaintek.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI
Nomor : 74/LL11/PR.00.02/2026**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XI TAHUN 2025-2029**

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, diperlukan perencanaan strategis yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa Rencana Strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja organisasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, setiap instansi pemerintah wajib Menyusun Rencana Strategis sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI tentang Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

- Mengingat
- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
11. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Tahun 2025–2029, sebagai dokumen perencanaan LLDIKTI Wilayah XI untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah XI.
- KETIGA : Data dan informasi kinerja yang termuat dalam dokumen Renstra LLDIKTI Wilayah XI Tahun 2025–2029 yang telah diinput dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah XI periode sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 05 Mei 2026

KEPALA




MUHAMMAD AKBAR

NIP 196707021994031004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH XI**

RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI periode 2025–2029 ini dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan panduan utama dan peta jalan bagi seluruh jajaran LLDIKTI Wilayah XI dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kalimantan.

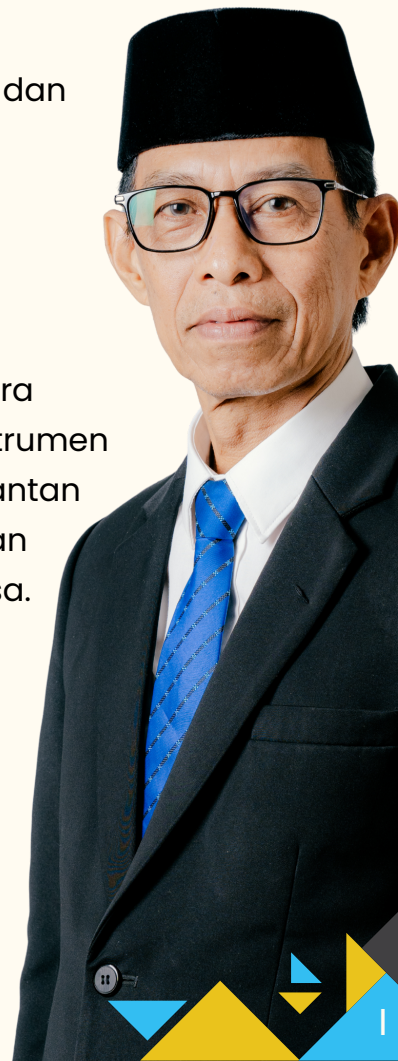
Periode 2025–2029 adalah periode yang krusial. Kalimantan kini berada di jantung pembangunan nasional sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menuntut seluruh sektor, termasuk pendidikan tinggi, untuk bertransformasi dan berkontribusi secara optimal. LLDIKTI Wilayah XI memandang tantangan ini sebagai peluang emas untuk mengokohkan peran PTS sebagai pintu utama inovasi dan pencetak SDM unggul yang siap mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pencapaian target Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang erat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan untuk bersama-sama mengawal dan melaksanakan strategi yang termuat di dalamnya. Semoga Renstra LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025–2029 ini menjadi instrumen efektif yang membawa pendidikan tinggi di Kalimantan mencapai mutu tertinggi, berdaya saing global, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan bangsa.



Banjarmasin, 04 Mei 2026
Kepala LLDIKTI Wilayah XI


Muhammad Akbar





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
BAB-I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	10
BAB-II Tujuan dan Sasaran	21
2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	24
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	25
BAB-III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	26
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	26
3.2 Kerangka Regulasi	29
3.3 Kerangka Kelembagaan	31
3.4 Reformasi Birokrasi	32
BAB-IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	33
4.1 Target Kinerja	33
4.2 Kerangka Pendanaan	34
BAB-V Penutup	35
Lampiran	36

BAB I

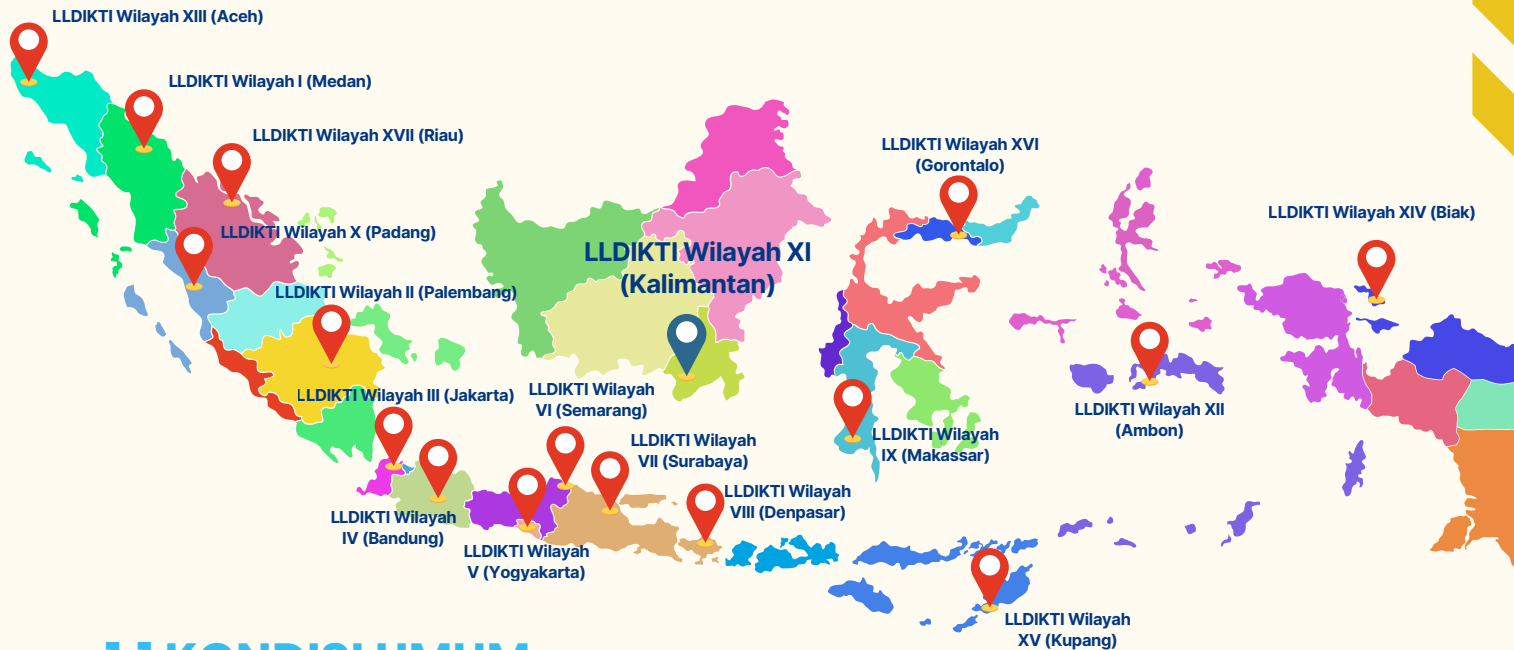
PENDAHULUAN

Memasuki periode 2025–2029, Indonesia berada pada momentum krusial untuk membangun fondasi kokoh menuju Visi Indonesia Emas 2045. Sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, cita-cita besar ini mengarah pada transformasi Indonesia menjadi negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Keberhasilan lompatan besar ini diukur melalui lima pilar utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengikisan kesenjangan ekonomi, penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM) di kancah global, perluasan pengaruh internasional, serta komitmen terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

Guna menjawab tantangan tersebut secara taktis, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Periode 2025–2029 hadir sebagai kompas arah kebijakan yang terintegrasi penuh dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dokumen ini secara tegas memetakan sasaran strategis dan indikator kinerja makro demi memastikan kontribusi nyata sektor pendidikan tinggi terhadap agenda pembangunan nasional.

Sesuai dengan delapan misi utama RPJPN, akselerasi pembangunan SDM berkualitas tinggi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) memegang peran sentral. Amanat inilah yang melandasi mandat Kemdiktisaintek dalam merancang ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing global, sekaligus menstimulasi riset inovatif yang mampu menggerakkan roda ekonomi hijau berkelanjutan.

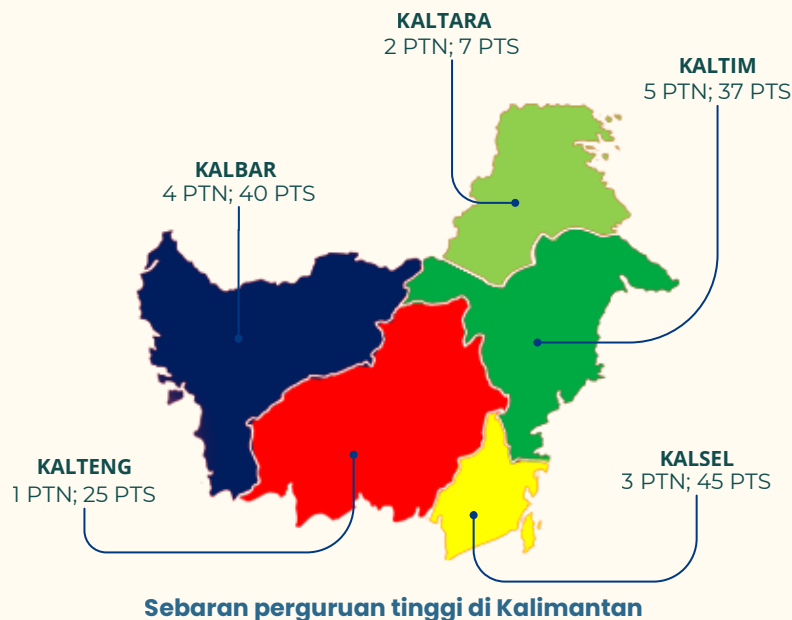
Selaras dengan hal tersebut, Renstra LLDIKTI Wilayah XI disusun sebagai perpanjangan tangan dan pedoman operasional dari kebijakan Kemdiktisaintek untuk kurun waktu 2025–2029. Sebagai fasilitator peningkatan mutu pendidikan tinggi di wilayah Kalimantan, LLDIKTI Wilayah XI memegang peran strategis dalam mengawal perguruan tinggi agar tumbuh menjadi institusi yang unggul, kolaboratif, inklusif, dan adaptif. Melalui Renstra ini, iklim akademik di Kalimantan diarahkan untuk mampu memberikan dampak konkret bagi kemajuan sosial-ekonomi daerah, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta menyukseskan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tanah borneo.



1.1 KONDISI UMUM

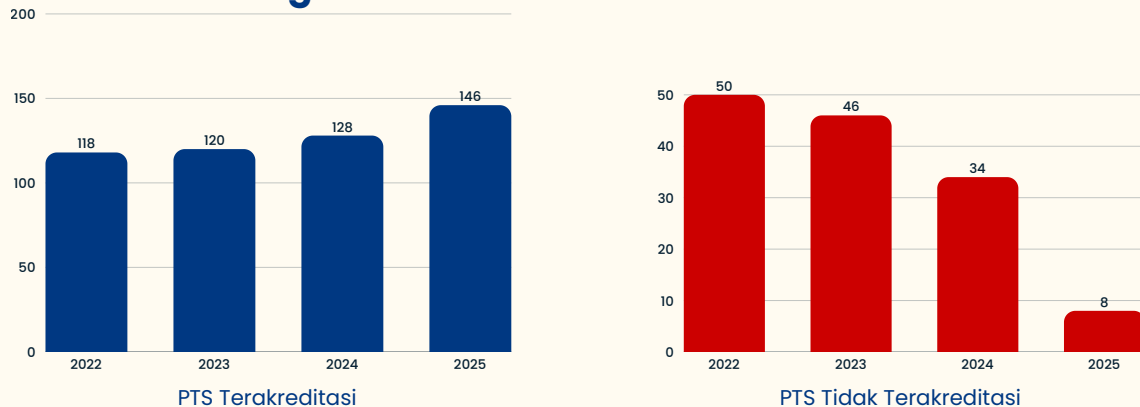
LLDIKTI Wilayah XI mempunyai tugas sebagai fasilitator peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di wilayah kerja Kalimantan yang meliputi 5 provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

Secara geografis, Pulau Kalimantan memiliki luas total sekitar 544.150 km. Luas ini mencakup sekitar 28,48% dari total luas daratan Indonesia dan secara kasar 4 kali lebih luas dari Pulau Jawa (yang luasnya sekitar 132.000 km). Namun, jumlah penduduk di seluruh provinsi Kalimantan saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 17,2 juta jiwa (berdasarkan proyeksi 2024), atau sekitar 6,1% dari total populasi Indonesia. Berikut merupakan gambaran umum kondisi Pendidikan tinggi di Kalimantan:





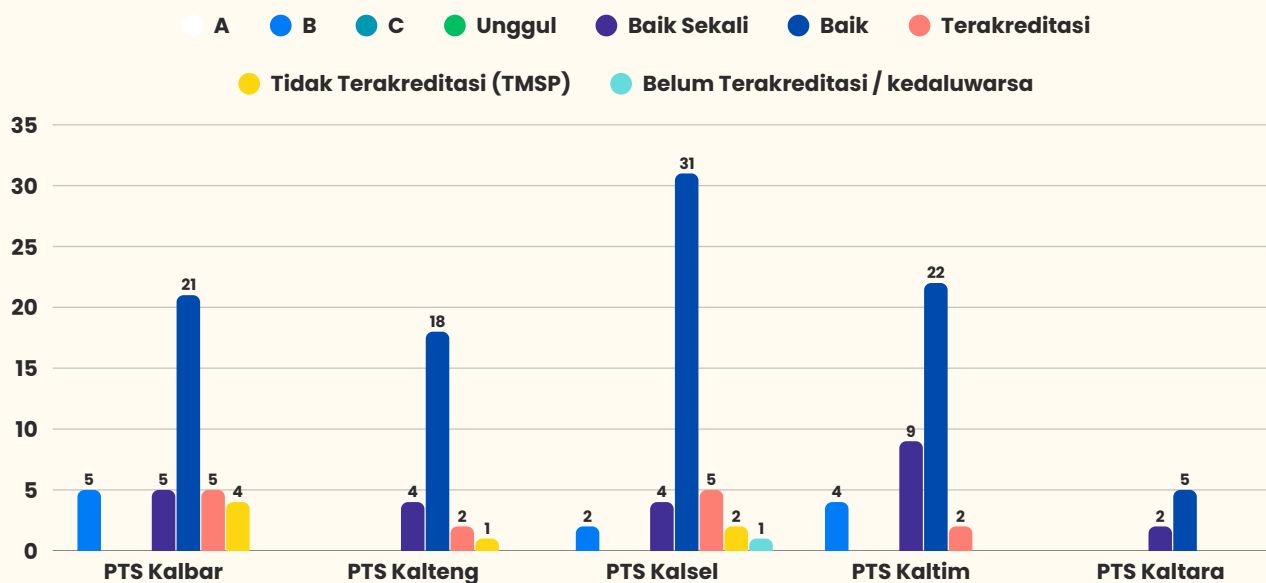
Perkembangan Akreditasi Institusi PTS di Kalimantan



Jumlah Perguruan Tinggi Berdasarkan Kelompok Pembina

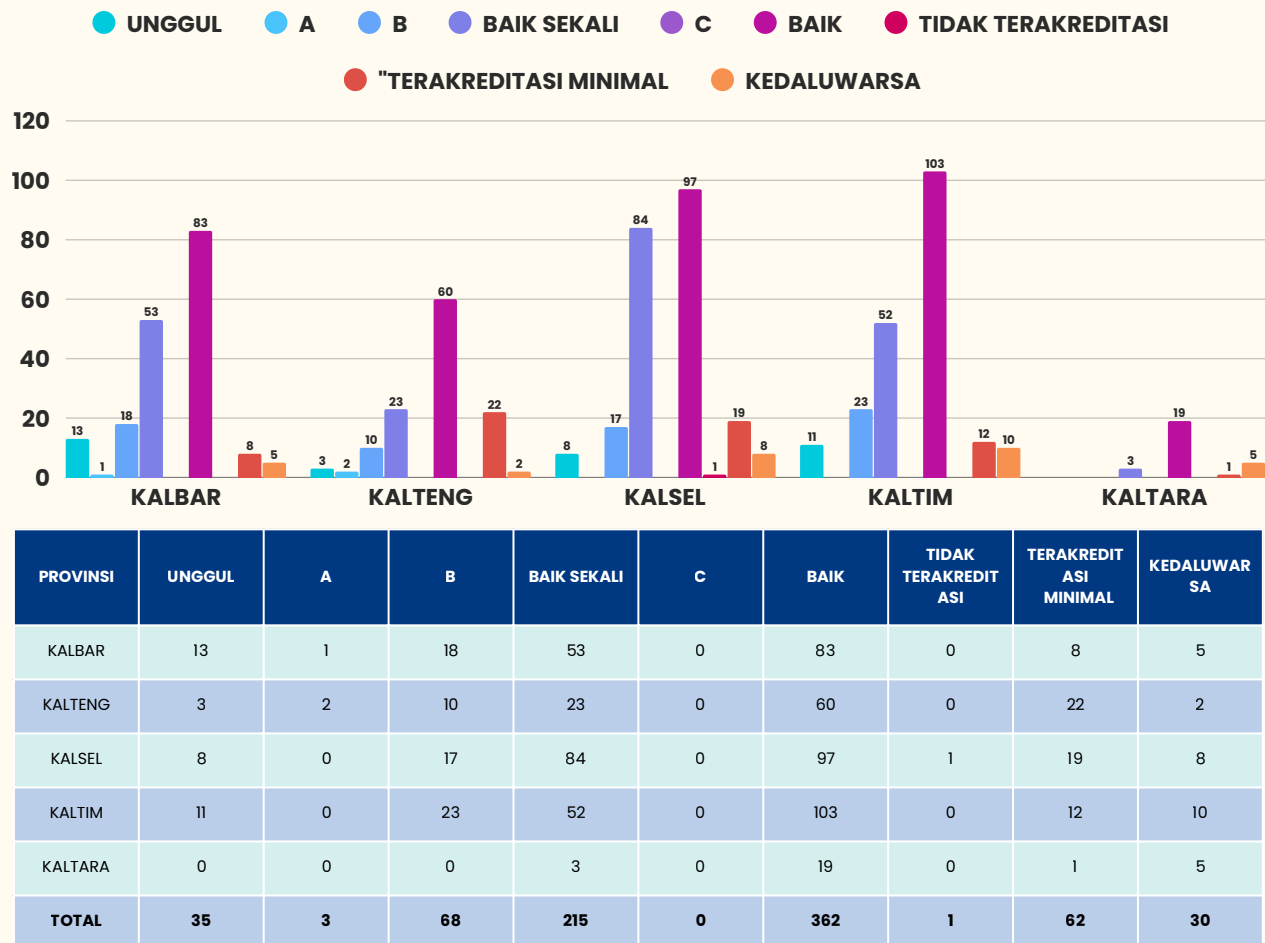


Akreditasi Institusi PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI



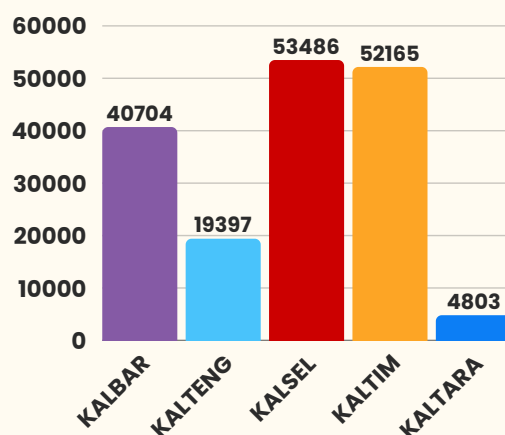
Provinsi	Peringkat									Jumlah
	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Terakreditasi	TMSP	Belum Terakreditasi	
Kalimantan Barat	0	5	0	0	5	21	5	4	0	40
Kalimantan Tengah	0	0	0	0	4	18	2	1	0	25
Kalimantan Selatan	0	2	0	0	4	31	5	2	1	45
Kalimantan Timur	0	4	0	0	9	22	2	0	0	37
Kalimantan Utara	0	0	0	0	2	5	0	0	0	7
Total	0	11	0	0	24	97	14	7	1	154

Akreditasi Prodi PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI

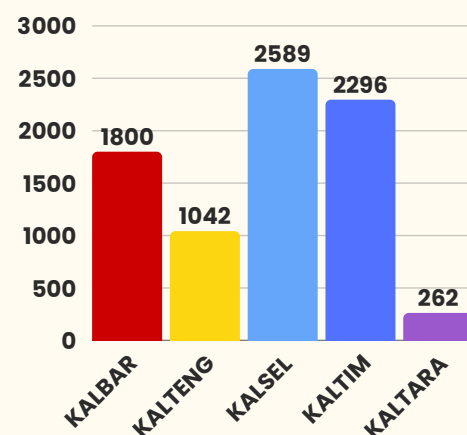


Dosen dan Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI

Berdasarkan data per Desember tahun 2025 jumlah mahasiswa yang sedang menempuh studi pada perguruan tinggi swasta di Kalimantan sebanyak 170.555 orang dengan dosen sebanyak 7.989 orang dengan sebaran sebagai berikut :

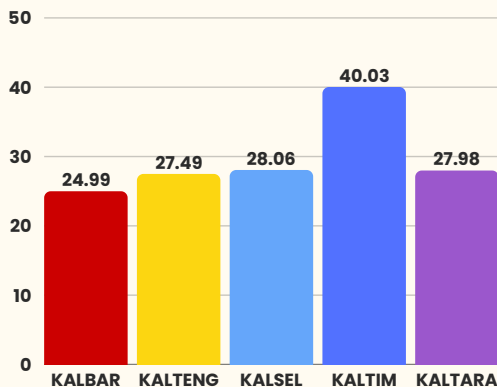


Sebaran mahasiswa di Kalimantan

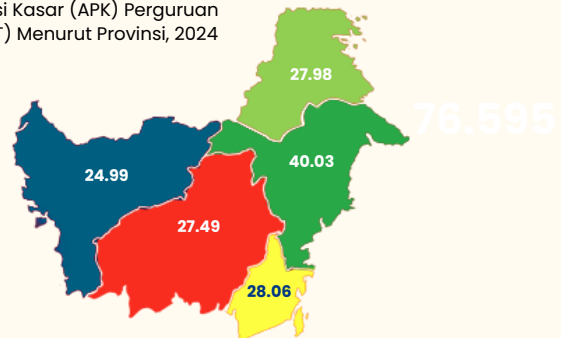


Sebaran dosen di Kalimantan

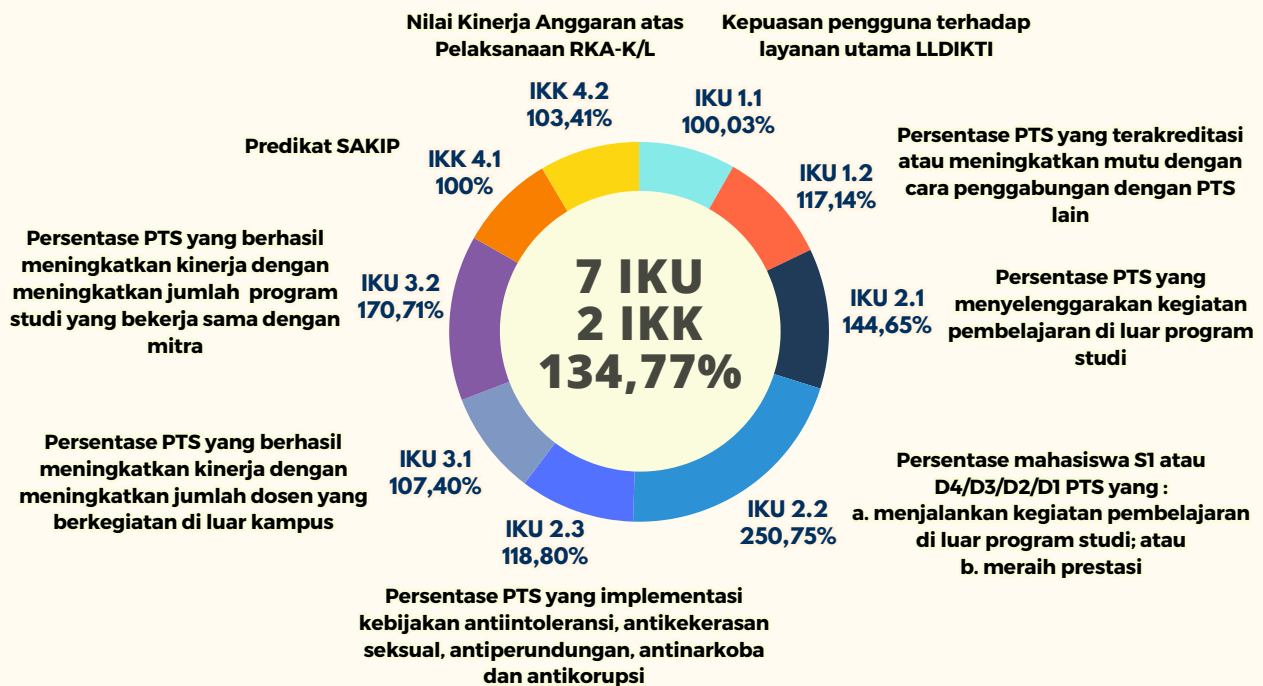
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Kalimantan



Data Badan Pusat Statistik Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi, 2024



Capaian Renstra LLDIKTI Wilayah XI 2020–2024



Pengukuran tingkat capaian dirumuskan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024, seluruh target kinerja yang ditetapkan LLDIKTI Wilayah XI telah tercapai atau dapat dinyatakan “berhasil” karena capaiannya sama atau di atas dari target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja keseluruhan sebesar 134,77%. Berikut adalah tabel tingkat ketercapaian target rencana strategis LLDIKTI Wilayah XI tahun 2020–2024 :



Capaian Rencana Strategis Tahun 2020–2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Kepmendikbud 3/M/2021			Kepmendikbudristek 210/M/2023	
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	Renstra	90	90	99	-	-
			PK	90	96	99	-	-
			Realisasi	96	99	100	-	-
		Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	Renstra	-	-	-	88	90
			PK	-	-	-	88	90
			Realisasi	-	-	-	88.48	90.03
		Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	Renstra	8	10	15	-	-
			PK	8	10	15	-	-
			Realisasi	9.03	9.52	16.07	-	-
		Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	Renstra	-	-	-	78	80
			PK	-	-	-	78	80
			Realisasi	-	-	-	78.39	93.71
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	Renstra	3	9	17	-	-
			PK	3	8	17	-	-
			Realisasi	7.83	15.48	22.62	-	-
		Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	Renstra	-	-	-	13	20
			PK	-	-	-	13	20
			Realisasi	-	-	-	17.90	28.93
		Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	Renstra	-	-	-	0.5	1.3
			PK	-	-	-	0.5	1.3
			Realisasi	-	-	-	1.20	3.26



No	Sasaran	Indikator	Target	Kepmendikbud 3/M/2021			Kepmendikbudristek 210/M/2023	
				2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi	Renstra	20	40	50	-	-
			PK	20	10	50	-	-
			Realisasi	6.02	19.05	50.6	-	-
		Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi	Renstra	-	-	-	0.6	18
			PK	-	-	-	0.6	18
			Realisasi	-	-	-	0.62	21.38
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	Renstra	30	40	48	-	-
			PK	30	20	48	-	-
			Realisasi	8.43	38.1	51.79	-	-
		Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	Renstra	-	-	-	56	65
			PK	-	-	-	56	65
			Realisasi	-	-	-	60.49	69.81
		Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	Renstra	-	-	-	7	14
			PK	-	-	-	7	14
			Realisasi	-	-	-	8.02	23.90
4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	Predikat SAKIP	Renstra	BB	BB	BB	A	A
			PK	BB	BB	BB	A	A
			Realisasi	BB	BB	BB	A	AA
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Renstra	80	80	93	94	95
			PK	80	93	93	94	96.5
			Realisasi	92.82	91.72	93.11	96.02	99.79

Isu Strategis Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi

- **Kesenjangan Mutu dan Akreditasi Institusi**

Meskipun jumlah PTS cukup banyak, sebagian besar masih menghadapi tantangan serius dalam mencapai akreditasi Unggul atau Baik Sekali. Isu ini mencakup rendahnya rasio dosen berpendidikan S3, publikasi ilmiah internasional yang minim, serta manajemen tata kelola yang belum sepenuhnya profesional

- **Implementasi Program Kampus Berdampak**

Implementasi Kampus Berdampak pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah lanjutan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di mana fokus tidak hanya pada kebebasan mahasiswa belajar di luar kampus, tetapi pada kontribusi nyata dan terukur dari kampus untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat. Keberhasilannya di PTS Kalimantan bergantung pada kemampuan LLDIKTI XI untuk menanggapi karakteristik geografis dan disparitas SDM wilayah tersebut dengan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan sangat terfokus pada masalah-masalah regional.

- **Pengelolaan KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi Swasta**

pengawasan KIP Kuliah merupakan salah satu isu strategis yang paling rentan terhadap risiko integritas (korupsi), karena melibatkan dana publik yang besar dan alur birokrasi yang panjang. Keberhasilan LLDIKTI Wilayah XI di tahun 2025–2029 akan ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah ancaman korupsi menjadi peluang untuk menegakkan transparansi dan memastikan hak pendidikan benar-benar dinikmati oleh yang paling berhak.

- **Pengembangan Karier Dosen**

Pengembangan karier dosen bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi investasi strategis bagi masa depan pendidikan tinggi di Kalimantan. LLDIKTI Wilayah XI perlu mengatasi hambatan birokrasi, memfasilitasi sumber daya, dan menanamkan budaya pelayanan prima agar para dosen dapat bertransformasi menjadi pilar keunggulan akademik yang kompetitif secara nasional. LLDIKTI harus terus bertransformasi menjadi lembaga layanan yang menjadi mitra strategis bagi PTS untuk meningkatkan kualitas karier dosen.

- **Tantangan 5 Dosa Pendidikan Tinggi**

Tantangan Lima Dosa Pendidikan Tinggi di Kalimantan bukanlah sekadar isu moral, tetapi adalah ancaman terhadap ekosistem akademik yang sehat. Keberhasilan LLDIKTI XI di tahun 2025–2029 akan dilihat dari sejauh mana kampus-kampus di Kalimantan menjadi zona aman, inklusif, dan berintegritas, yang merupakan prasyarat mutlak untuk menghasilkan lulusan yang unggul.

- **Pembangunan Zona Integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan komitmen LLDIKTI Wilayah XI untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani. Keberhasilan LLDIKTI Wilayah XI di tahun 2025–2029 akan bergantung pada keberanian Pimpinan untuk mengambil tindakan tegas terhadap penyimpangan dan kemampuan institusi untuk secara konsisten menerapkan digitalisasi zero contact di seluruh layanan penting. Hanya dengan demikian, LLDIKTI XI dapat menjadi teladan integritas bagi seluruh Perguruan Tinggi di Kalimantan.

- **Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah pilar utama dalam Reformasi Birokrasi, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan bebas dari korupsi. Digitalisasi yang sudah dicapai LLDIKTI Wilayah XI adalah modal awal yang kuat. Namun, untuk benar-benar menjadi lembaga layanan modern yang berintegritas dan efisien, tantangan ini harus diatasi melalui integrasi sistem berbasis data (satu data). Integrasi data adalah kunci untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan selaras dengan tujuan SPBE.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Perguruan Tinggi di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir terus tumbuh dan cukup signifikan. Pertumbuhan partisipasi Perguruan Tinggi terus meningkat, namun pertumbuhan Perguruan Tinggi tidak berbanding lurus dengan kualitas Pendidikan Tinggi. Indikatornya yaitu Akreditasi Prodi maupun Akreditasi Institusi. Pendidikan Tinggi di Kalimantan masih tertinggal dibanding pulau-pulau lainnya di Indonesia. Ironis memang, di satu sisi kualitas Pendidikan Tinggi masih menjadi salah satu kelemahan kita, disisi lain Perguruan Tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

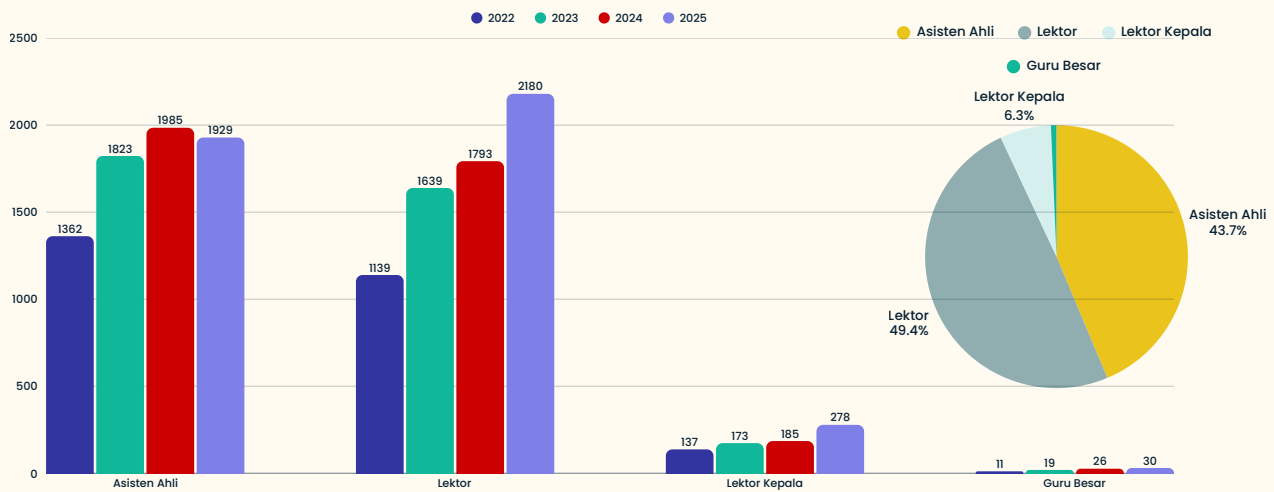
Pada saat yang sama, globalisasi mendorong stakeholder untuk semakin cerdas dan kompetitif, dalam memilih Pendidikan Tinggi. Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menjadi kunci bagi kemajuan bangsa dan mendukung daya saing bangsa, dengan menghasilkan lulusan yang berkarakter, cerdas dan terampil secara komprehensif.

Data BAN PT menunjukkan Potret mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia masih belum menunjukkan kualitas yang merata. Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan strategi untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi. Diperlukan langkah yang sistematis, efektif dan efisien dalam melakukan peningkatan mutu yang terus menerus (Continuous Quality Improvement) dengan cara membangun budaya mutu disetiap program studi dengan melakukan audit mutu internal secara terus menerus.

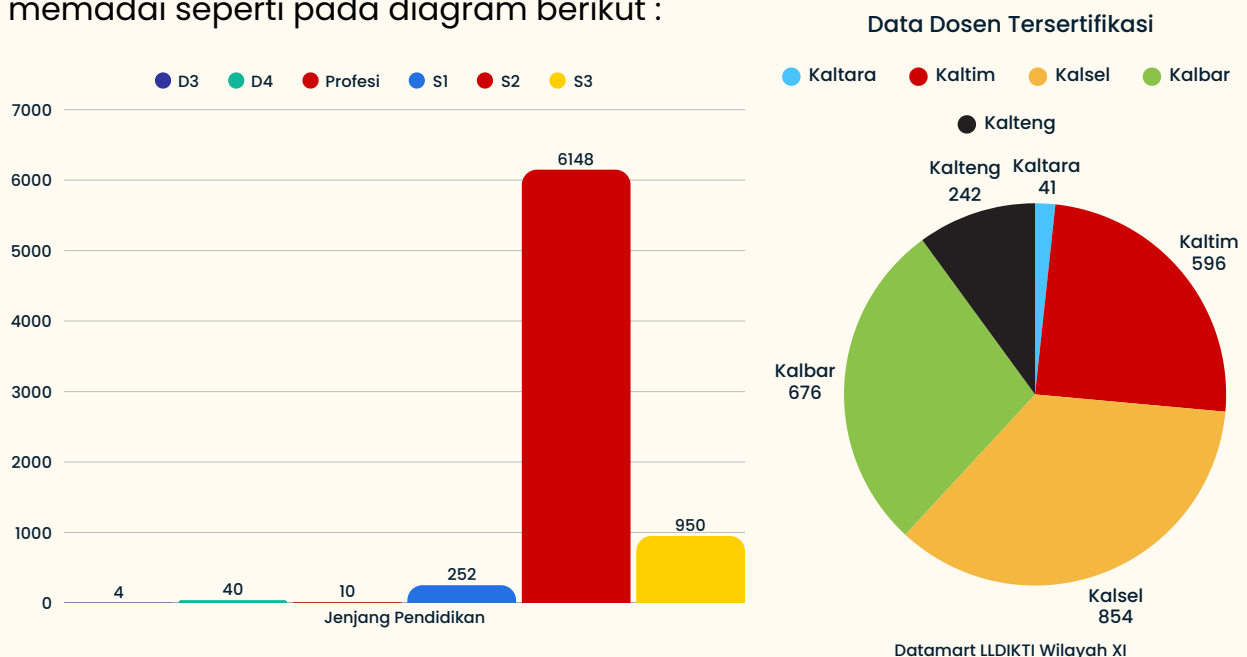
Sampai dengan tahun 2024 LLDIKTI Wilayah XI sudah melaksanakan beberapa program/kegiatan yang merupakan bagian dari Rencana Strategis. Program/Kegiatan LLDIKTI Wilayah XI lebih diprioritaskan pada kegiatan Penguatan Kelembagaan PTS untuk mendukung percepatan peningkatan mutu Perguruan Tinggi, karena bagi PTS pengakuan akreditasi institusi adalah hal yang sangat penting, disamping akreditasi prodi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang bahwa satuan penyelenggara pendidikan harus memperoleh pengakuan dalam bentuk akreditasi institusi.

Target-target Pendidikan Tinggi pada akhir tahun tahun renstra 2020–2024 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut menandakan bahwa LLDIKTI Wilayah XI telah melakukan langkah yang antisipatif dan strategis dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dengan sangat baik.

Perguruan tinggi dalam meningkatkan mutunya juga tidak terlepas dari kualitas dosennya. Dari data jabatan fungsional dosen pada tahun 2022 - 2025 terjadi peningkatan dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar yang berada pada wilayah binaan LLDIKTI Wilayah XI seperti yang disajikan pada diagram berikut :



Tingkat pendidikan dosen pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kalimantan juga mengalami ketidakseimbangan yang signifikan dalam kualifikasi akademik yang menjadi tantangan utama bagi mutu pendidikan tinggi di wilayah tersebut. Hampir 85% dari total dosen memiliki kualifikasi S2. Ini menunjukkan bahwa mayoritas dosen telah memenuhi syarat minimal untuk mengajar di perguruan tinggi, kemudian Jumlah dosen bergelar Doktor (S3) mencapai 950 orang, atau sekitar 13% dari total dosen. Angka ini jauh di bawah standar ideal untuk institusi yang menargetkan akreditasi Unggul, yang menuntut rasio doktor yang lebih tinggi, serta jumlah Guru Besar yang memadai seperti pada diagram berikut :



Evolusi Peran dan Ekspektasi Publik terhadap Perguruan Tinggi

Ekspektasi masyarakat pada Perguruan Tinggi berkembang dinamis dari waktu ke waktu. Pada saat pertama kali Perguruan Tinggi berdiri, masyarakat berharap Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai agent of education. Pada fase awal ini, fokus utama institusi pendidikan tinggi adalah menjadi pusat transmisi keilmuan, mencetak kaum intelektual, serta menyediakan akses pengajaran yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan literasi dan kompetensi dasar bangsa.

Namun, seiring dengan kompleksitas tantangan zaman, peran tersebut dianggap tidak lagi memadai. Saat Perguruan Tinggi sudah mampu memerankan dirinya sebagai agent of education, masyarakat mulai menaruh harapan yang lebih besar. Perguruan Tinggi tidak hanya dituntut dapat memerankan dirinya sebagai agen pengajaran, tetapi juga harus mampu memosisikan diri sebagai agent of research and development. Pada tahapan kedua ini, orientasi kelembagaan mulai bergeser ke arah penguatan tradisi ilmiah, penemuan teori-teori baru, serta penyusunan metodologi pemecahan masalah melalui riset yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan industri.

Harapan yang dibebankan pada pundak institusi akademik ini terus berlanjut hingga diadopsinya paradigma modern saat ini, di mana masyarakat berharap Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai agent of knowledge and technology transfer, dan pada muara akhirnya, tumbuh menjadi agent of economic development. Transformasi multidimensional ini menuntut perguruan tinggi untuk meruntuhkan dinding menara gading akademiknya dan mulai meleburkan diri ke dalam ekosistem hilirisasi global. Lembaga pendidikan kini dipandang sebagai motor penggerak utama dalam rantai pasok ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy), di mana aset intelektual yang dihasilkan di dalam laboratorium dan ruang kelas harus mampu dikonversi menjadi komoditas strategis yang memiliki nilai jual, daya saing regional, serta mampu membuka lapangan pekerjaan baru.

Untuk dapat memenuhi tuntutan dan harapan kolektif masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan aktif sebagai agent of economic development, maka institusi Perguruan Tinggi mutlak dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang applicable serta memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas.

Pendidikan tinggi di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar, baik dari segi kualitas, relevansi, maupun dampak terhadap masyarakat. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meluncurkan sebuah program yang relevan dengan kondisi tersebut, yaitu Kampus Berdampak.

Program yang baru saja dikenalkan oleh Kemdiktisaintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) merupakan kelanjutan dari gerakan Kampus Merdeka yang sudah diterapkan sebelumnya. Melalui program terbaru ini diharapkan bisa menjadikan kampus lebih berdaya dan berdampak langsung kepada masyarakat, dunia industri dan usaha, serta mendukung ekosistem riset dan inovasi untuk pembangunan nasional.

Kampus Berdampak adalah program yang dirancang untuk menjadikan perguruan tinggi di Indonesia tidak hanya berperan dalam menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga sebagai pusat solusi bagi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada di masyarakat. Program ini lebih mengarah kepada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bersama, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dunia industri, dan pemerintah daerah. Kampus Berdampak bertujuan untuk membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kampus Merdeka, yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Kemdiktisaintek, berfokus pada kebebasan mahasiswa dalam memilih jalur pembelajaran, baik melalui magang, pertukaran pelajar, ataupun kegiatan lain di luar kampus yang relevan dengan program studi mereka. Dalam Kampus Merdeka, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri di luar batas ruang kelas, sehingga mereka siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Sedangkan Kampus Berdampak tidak hanya terbatas pada pembelajaran atau pengembangan mahasiswa saja, tetapi lebih menekankan pada hasil dari proses pendidikan itu sendiri yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kampus Berdampak bertujuan untuk mendorong perguruan tinggi agar menjadi agen perubahan yang aktif dalam memecahkan masalah-masalah nyata yang ada di masyarakat. Kampus Merdeka lebih kepada kebebasan dalam proses pembelajaran, sedangkan Kampus Berdampak lebih kepada kontribusi nyata dari kampus kepada masyarakat.

Perbedaan program kampus merdeka dengan kampus berdampak :

Aspek	Kampus Merdeka	Kampus Berdampak
Fokus Utama	Kebebasan mahasiswa dalam memilih jalur pembelajaran	Pemberdayaan masyarakat dan kontribusi nyata terhadap masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan
Tujuan	Menyiapkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja dengan keterampilan praktis	Menjadikan perguruan tinggi sebagai agen perubahan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat
Pendekatan Pembelajaran	Pembelajaran berbasis kebebasan (magang, pertukaran pelajar, studi independen)	Pembelajaran berbasis aksi yang melibatkan pengaplikasian ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah nyata
Program Unggulan	Magang, pertukaran pelajar, proyek penelitian, dan kegiatan di luar kampus	Penguatan kapasitas organisasi mahasiswa, magang berdampak, kewirausahaan, program pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi riset berbasis aplikasi
Keterlibatan Mahasiswa	Mahasiswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang memperkaya pengalaman pribadi	Mahasiswa berkontribusi langsung dalam proyek yang memberikan solusi nyata untuk masyarakat dan dunia industri
Peran Perguruan Tinggi	Menjadi lembaga yang menyediakan pendidikan berkualitas dan relevansi pasar kerja	Menjadi pusat solusi untuk masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta inovator sosial
Kolaborasi dengan Pihak Lain	Terbatas pada industri untuk mendukung kebutuhan keterampilan praktis mahasiswa	Kolaborasi lebih luas dengan masyarakat, pemerintah, industri, dan lembaga riset untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan
Pengukuran Dampak	Dampak lebih pada kesiapan mahasiswa di dunia kerja dan pengembangan keterampilan	Dampak diukur melalui kontribusi langsung kepada masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan pengembangan ekonomi lokal
Visi Jangka Panjang	Menyiapkan lulusan yang berdaya saing tinggi di dunia kerja	Menyiapkan perguruan tinggi yang berperan aktif dalam membangun Indonesia Emas 2045 dengan dampak sosial yang luas

Kepuasan pengguna terhadap layanan LLDIKTI Wilayah XI merupakan poin selanjutnya untuk ditetapkan sebagai indikator kinerja. LLDIKTI sebagai Lembaga yang memberikan layanan kepada perguruan tinggi juga selalu meningkatkan kinerjanya. Dalam penerapan e-government dengan membangun beberapa sistem yang mendigitalisasi layanan yang diberikan kepada stakeholder, saat ini LLDIKTI Wilayah XI telah mempunyai beberapa sistem yang dibangun dan dikembangkan sendiri untuk dapat menunjang tugas dan fungsi diantaranya :

Sistem Informasi Pelayanan Publik (unggulan)



PINANDU

Aplikasi Unit Layanan Terpadu Online LLDIKTI Wilayah XI

Sistem Informasi Proses Bisnis Utama



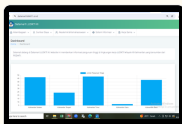
SINGKRON

Sistem Informasi Angka Kredit Online Dosen



SIBEKEN

Sistem Informasi Beban Kerja Dosen



DATAMART

Pemetaan Mutu Perguruan Tinggi di Kalimantan



SISPRAS

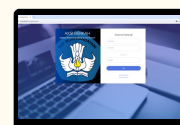
Sistem Informasi Pendataan Sarana dan Prasarana Pendidikan



PPID LLDIKTI XI

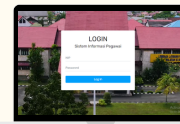
Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sistem Informasi Administrasi



AKSI BERKAH

Aplikasi Presensi Dosen



SARLAIN

Sistem Informasi Layanan Internal



E-SAKIP

Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah



e-Bupot PPH 21

Fitur Website Penyampaian bukti potong pajak A2 dan Pelaporan SPT Tahunan



Surat Daring

Persuratan Online LLDIKTI XI dengan PTS

Penilaian Beban Kinerja Dosen berbasis sistem



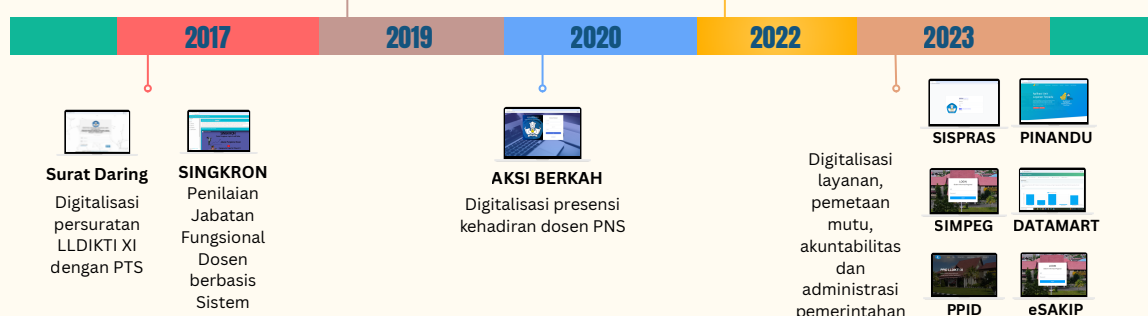
SIBEKEN

Penyampaian bukti potong pph 21 melalui sistem



eBUPOT PPh 21

Linimasa pengembangan sistem informasi LLDIKTI Wilayah XI



Dari data tersebut LLDIKTI Wilayah XI melakukan analisis menggunakan metode SWOT yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dengan hasil sebagai berikut :

1.2.1 Permasalahan

Kelemahan (Weakness)

Ketidakseimbangan Rasio SDM Pegawai dengan Institusi Binaan

Jumlah tim kerja internal LLDIKTI XI sangat terbatas, yaitu hanya 61 orang pegawai yang terdiri dari 2 struktural, 16 fungsional, 37 pelaksana, dan 6 PPNPN. Jumlah ini sangat sedikit karena harus melayani beban kerja pengawasan yang sangat besar terhadap 154 PTS (7.989 Dosen, 777 Prodi dan 170.555 mahasiswa) serta 15 PTN (633 Prodi) yang tersebar diseluruh Kalimantan.

Keterbatasan Jangkauan Geografis

Luasnya wilayah pulau Kalimantan yang terdiri dari 5 provinsi (Selatan, Tengah, Barat, Timur, dan Utara) dengan sebaran PTS yang berjauhan menjadi hambatan utama dalam melakukan pemerataan mutu pendidikan tinggi secara fisik langsung di lapangan. Pada saat ini pembinaan dari LLDIKTI Wilayah XI (Kalimantan Selatan) yang paling mudah dijangkau melalui transportasi darat adalah pada PTS di Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah. Akses paling jauh adalah PTS pada Provinsi Kalimantan Barat dan Utara karena belum adanya penerbangan langsung dan apabila melalui perjalanan darat memakan waktu lebih dari 30 jam .

Tata kelola Teknologi dan Informasi

Meskipun LLDIKTI Wilayah telah memiliki berbagai macam sistem dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi namun integrasi data lintas sistem belum sepenuhnya kuat sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan angka/versi data yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Kesiapan implementasi SPBE dan dukungan teknologi informasi juga belum merata, ditandai dengan belum optimalnya penerapan sistem layanan terpadu, single sign-on, serta masih adanya ketergantungan pada proses manual.

Ancaman (Threats)

Perubahan Regulasi Pendidikan Tinggi

Perubahan regulasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang cepat dapat menghambat kesiapan LLDIKTI Wilayah XI dalam memberikan fasilitasi kepada PTS. Ketidaksiapan PTS dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan baru juga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian tata kelola dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi.

Disparitas Mutu Akreditasi PTS

Dari total 154 PTS di Kalimantan, baru 147 PTS yang terakreditasi. Meskipun jumlah PTS cukup banyak, sebagian besar masih menghadapi tantangan serius dalam mencapai akreditasi Unggul atau Baik Sekali. Isu ini mencakup rendahnya rasio dosen berpendidikan S3, publikasi ilmiah internasional yang minim, serta manajemen tata kelola yang belum sepenuhnya profesional.

Kualitas Pelaporan Data Perguruan Tinggi

Meskipun LLDIKTI Wilayah XI sudah memiliki sistem Datamart sebagai dashboard mutu perguruan tinggi di Kalimantan namun ketergantungan terhadap kualitas pelaporan data dari perguruan tinggi swasta yang masih bervariasi berisiko menimbulkan ketidaksinkronan data, menghambat pemantauan capaian kinerja, dan mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan. Mutu pelaporan data operasional dari PTS yang belum merata berpotensi menghasilkan data PDDIKTI yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Ketidaksinkronan ini berisiko menimbulkan hambatan dalam pemantauan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi serta menurunkan akurasi kebijakan bindalwas yang diambil.

Rendahnya Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertinggi Dosen

Jumlah dosen dengan kualifikasi tertinggi di lingkungan PTS masih sangat minim. Dari total 7.989 orang dosen PTS di Kalimantan, baru 30 orang yang berstatus sebagai Guru Besar.

Kesenjangan kapasitas dan tata kelola PTS

Meningkatnya permasalahan kelembagaan seperti konflik internal, dualisme, maupun ketidaksesuaian administrasi, yang berpotensi mengganggu stabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kerentanan Keamanan Siber dan server PDN

Banyaknya sistem informasi pelayanan publik dan operasional yang dikelola LLDIKTI Wilayah XI memperbesar risiko ancaman serangan siber yang berpotensi melumpuhkan stabilitas layanan digital, merusak basis data internal, serta mengancam kerahasiaan data sensitif kepegawaian dan PTS binaan. Ekosistem digital LLDIKTI Wilayah XI memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap infrastruktur server PDN yang disediakan oleh kementerian. Kondisi ini menempatkan LLDIKTI Wilayah XI pada risiko kerentanan kelangsungan layanan apabila terjadi gangguan teknis maupun perubahan kebijakan struktural di tingkat pusat seperti hambatan akses akibat transisi kelembagaan kementerian. Kemudian ancaman dapat terjadi pada peretasan server PDN seperti insiden peretasan besar yang terjadi pada Juni 2024, di mana sistem server PDN yang dikelola bersama Kominfo dan PT Telkom dilumpuhkan oleh serangan siber ransomware jenis Brain Cipher (pengembangan dari LockBit 3.0) yang mengakibatkan layanan pada beberapa instansi lumpuh.

1.2.2 Potensi

Kekuatan (Strength)

Komposisi dan Kapasitas SDM internal

Meskipun sedikit namun LLDIKTI Wilayah XI memiliki komposisi dan kapasitas SDM yang kuat dan berpengalaman serta berintegritas dalam memberikan layanan dan fasilitasi peningkatan mutu Perguruan tinggi. LLDIKTI Wilayah XI juga memiliki SDM yang memahami IT dengan sangat baik sehingga sejak tahun 2022 pembangunan dan pengelolaan sistem internal tidak bergantung dengan pihak luar.

Model Pembinaan dan Pengawasan Berbasis Risiko yang Efektif

LLDIKTI Wilayah XI memiliki keunggulan strategis dalam penerapan metode pembinaan klasterisasi berbasis risiko. Daripada menerapkan intervensi menyeluruh yang tidak efisien, LLDIKTI Wilayah XI secara taktis memfokuskan sumber daya yang terbatas untuk pendampingan intensif pada PTS dan Program Studi yang memiliki risiko mutu tertinggi seperti percepatan akreditasi minimum, pendampingan SPMI, dan penataan tata kelola. Pendekatan ini mengoptimalkan efisiensi anggaran operasional sekaligus mempercepat pengentasan disparitas mutu perguruan tinggi di Kalimantan.

Kemampuan Adaptasi Digital

Dalam mewujudkan budaya pelayanan prima, LLDIKTI Wilayah XI memiliki kemampuan adaptasi digital yang cukup baik melalui layanan online dan komunikasi publik yang aktif. Keberadaan layanan berbasis daring seperti PINANDU, SINGKRON, AKSI BERKAH dan lain sebagainya menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan pelayanan berjalan efektif, efisien, dan mudah diakses oleh perguruan tinggi, dosen, serta masyarakat.

Prestasi Tata Kelola Keuangan dan Akuntabilitas

LLDIKTI Wilayah XI memiliki rekam jejak tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan predikat SAKIP AA selama 2 tahun terakhir dan mendapatkan nilai kinerja anggaran yang sangat baik selama 5 tahun terakhir. Sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pada LLDIKTI Wilayah XI didukung dengan penggunaan aplikasi eSAKIP yang mengintegrasikan proses penyusunan sampai dengan pelaporan program kinerja dari setiap bidang. Kemudian upaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan yaitu optimalisasi transaksi cashless melalui Kartu Kredit Pemerintah dan CMS, Pengelolaan Penugasan melalui sistem SARLAIN, dan koordinasi efektif antara tim pengelola keuangan dengan perencanaan untuk mendapatkan akurasi penarikan dana yang tepat. Berbagai penghargaan seperti Gold Winner Penyelenggaraan SAKIP Terbaik tahun 2024 pada Anugerah Diktiristek, Terbaik Pertama pada KPPN Award Banjarmasin untuk Transaksi Kartu Kredit Pemerintah, Laporan Keuangan, dan Akurasi Rencana Penarikan Dana tahun 2024 menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah XI sangat berkomitmen dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja yang sehat.

Komitmen Tinggi Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Meskipun belum mendapatkan predikat ZI WBK oleh KemenpanRB pada tahun 2024 namun LLDIKTI Wilayah XI berhasil mendapatkan penghargaan sebagai satuan kerja terbaik dalam pembangunan zona integritas tahun 2024 oleh Kemendiktisaintek. Penghargaan dari kementerian membuktikan bahwa 6 area perubahan reformasi birokrasi sudah berjalan dengan sangat baik di internal LLDIKTI Wilayah XI. Pengakuan dari Kemendiktisaintek menandakan bahwa potensi LLDIKTI Wilayah XI untuk menembus predikat WBK nasional di periode berikutnya sudah sangat dekat.

Peluang (Opportunity)

Program Studi dengan Akreditasi Unggul

Keberadaan 35 program studi yang telah meraih akreditasi "Unggul" di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI menjadi langkah awal strategis yang membuka peluang besar bagi peningkatan status akreditasi institusi (perguruan tinggi) menuju peringkat Unggul.

Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN)

Ibu Kota Nusantara menjadi momentum strategis bagi perguruan tinggi swasta di Kalimantan untuk meningkatkan riset, relevansi lulusan, dan menjadi penopang utama kebutuhan SDM unggul di Ibu Kota Nusantara.

Potensi Hilirisasi Riset dan Pengabdian Berbasis Hibah

Animo dosen dalam mengusulkan riset sangat tinggi. Berdasarkan data tahun 2026 Terdapat total 1.368 usulan riset penelitian serta 280 usulan Pengabdian Masyarakat yang didanai oleh Kemendiktisaintek. Ini membuka peluang kerja sama riset terapan yang luas dengan sektor industri regional Kalimantan.

Kesiapan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan

Meningkatnya kesiapan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi membuka ruang perluasan kemitraan dalam riset, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai program strategis yang relevan dengan kebutuhan wilayah. Peluang tersebut semakin diperkuat melalui potensi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), khususnya pada isu-isu prioritas daerah seperti pariwisata, kesehatan, penguatan ekonomi wilayah, dan sektor-sektor unggulan lainnya.

Posisi Strategis Geografis Lintas Negara

Kondisi geografis Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei Darussalam membuka peluang besar bagi perluasan kemitraan akademis internasional, riset kolaboratif lintas batas, serta pengembangan pusat studi ASEAN untuk mendukung eksistensi perguruan tinggi di kancah global.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Tugas utama LLDIKTI Wilayah XI adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan merujuk Renstra Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai Unit Organisasi yang membawahnya serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing bangsa, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah XI dan mencermati potret permasalahan yang telah dijelaskan pada BAB I maka LLDIKTI Wilayah XI turut serta dalam mendukung Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai berikut :

VISI

"LLDIKTI Wilayah XI ikut serta dalam upaya untuk mendukung Visi Kemdiktisaintek mewujudkan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045"

MISI

- Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas
- Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat
- Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas

TUJUAN

- Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu
- Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi
- Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing
- Memperkuatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Tata nilai yang ada pada LLDIKTI Wilayah XI telah tertanam dalam Visi Kementerian. Visi Kemdiktisaintek 2025–2029 menegaskan komitmen untuk mewujudkan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang inklusif dengan semangat kolaboratif, adaptif dengan tetap menjaga akuntabilitas, serta berdaya saing global sehingga berdampak nyata bagi transformasi bangsa. Berikut tata nilai pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi :

Inklusivitas

Fondasi utama yang memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, terutama kelompok rentan, dapat mengakses dan berpartisipasi secara bermakna dalam pendidikan tinggi, riset, dan inovasi.

Semangat kolaboratif

Memperkuat inklusivitas dengan membangun sinergi berbagai pihak—dari akademisi, industri, pemerintah, hingga masyarakat sipil—dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan transparansi. Pendekatan inklusif dengan semangat kolaboratif diwujudkan melalui kemitraan lintas sektor yang mencakup keberagaman perspektif dan kebutuhan, tanpa diskriminasi, sehingga terwujud ekosistem pendidikan, sains, dan teknologi yang terbuka, adil, dan merata.

Adaptif

Menghadapi dinamika dan tantangan baik di tingkat nasional maupun global, pengelolaan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi haruslah adaptif dengan tetap menjaga akuntabilitas. Kelincahan untuk merespons perubahan secara cepat dan efektif, menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi yang berkembang, serta mengantisipasi tantangan masa depan dengan fleksibilitas dan ketahanan menjadi kunci keberhasilan transformasi bangsa. Namun, sifat adaptif tersebut harus tetap dibarengi dengan akuntabilitas yang tinggi. Kebijakan dan program yang dijalankan harus transparan dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdaya Saing Global

Adapun berdaya saing global diposisikan sebagai peningkatan mutu dan keunggulan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Keunggulan ini dicapai melalui penerapan standar kualitas bertaraf dunia, inovasi yang relevan dengan kebutuhan global, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi.

Tata nilai LLDIKTI Wilayah XI tahun 2025 – 2029 adalah **“BerAKHLAK”**. Penggunaan tata nilai BerAKHLAK diatur langsung dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Di sana ditegaskan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menginternalisasi tata nilai yang seragam ini demi mewujudkan kesamaan persepsi dan transformasi budaya kerja ASN di Indonesia sehingga LLDIKTI Wilayah XI menginternalisasikan dan menjadikan tata nilai tersebut menjadi nilai dasar organisasi.

Tata Nilai 1 : Berorientasi Pelayanan

Berkomitmen memberikan pelayanan prima, responsif, dan solutif untuk peningkatan mutu PTS di seluruh Kalimantan.

Tata Nilai 2 : Akuntabel

Bertanggung jawab penuh atas transparansi pengelolaan anggaran, keandalan data pelaporan, serta menjaga integritas tata kelola kelembagaan.

Tata Nilai 3 : Kompeten

Terus meningkatkan kapasitas diri, keahlian teknis, dan profesionalisme pegawai guna menjadi fasilitator pendidikan tinggi yang andal.

Tata Nilai 4 : Harmonis

Membangun lingkungan kerja yang saling menghargai, peduli, dan sinergis tanpa membedakan latar belakang.

Tata Nilai 5 : Loyal

Berdedikasi tinggi menjaga nama baik LLDIKTI Wilayah XI, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi/golongan.

Tata Nilai 6 : Adaptif

Terus berinovasi dan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.

Tata Nilai 7 : Kolaboratif

membangun kerja sama yang sinergis, terbuka, dan bersedia bersinergi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Perumusan tujuan LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin ditujukan untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai penggerak sektor pembangunan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemdiktisaintek serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, maka Kemdiktisaintek menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program yang kemudian menjadi acuan LLDIKTI Wilayah XI sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan Kemdiktisaintek
Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	12,68
Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi	Persentase pekerja lulusan pendidikan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah-tinggi	65,53
Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing	Peringkat Indeks Inovasi Global	49
Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	89,87

Tabel 2.1.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

2.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan tersebut diatas diperlukan sejumlah sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025–2029. Sasaran tersebut adalah:

- Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
- Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
- Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
- Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

Kemudian keempat sasaran kegiatan yang ditetapkan tersebut juga ditetapkan indikator kinerjanya sesuai dengan Kepmendiktisaintek nomor 358/M/KEP/2025 yang terangkum dalam tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	• Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
2	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	• Keunggulan layanan LLDIKTI • Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) • Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas
3	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	• Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI • Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi
4	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan	• Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI • Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya • Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS

Tabel 2.2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi pada kurun waktu 2025–2029, dalam rangka mendukung keberlanjutan Pembangunan Nasional dan tujuan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, berfokus pada Kebijakan Kampus Berdampak. Kebijakan ini bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi yang berkontribusi nyata bagi semua rakyat Indonesia. Hal ini dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran yang relevan dan berkualitas, serta mutu pendidikan yang merata baik secara geografis, sosial, maupun status ekonomi.

Selain itu, fokus pembangunan pendidikan tinggi diarahkan pada pemantapan karakter bangsa melalui perbaikan tata kelola, prosedur digital (SPBE), dan pendanaan pendidikan yang fokus pada outcome serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

LLDIKTI Wilayah XI dalam tugas dan fungsinya guna menjalankan kebijakan substansial Kampus Berdampak diarahkan pada 3 (tiga) pilar arah kebijakan utama yang dijabarkan sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1

Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Kebijakan ini diambil sebagai respons strategis terhadap tantangan geografis dan sosio-ekonomi di wilayah Kalimantan. Pemerataan layanan akan menjamin bahwa setiap anak bangsa di Kalimantan mendapatkan hak yang sama untuk menikmati pendidikan tinggi dengan standar mutu yang setara.

Implementasi arah kebijakan ini difokuskan pada perluasan jangkauan program bantuan pendidikan, fasilitasi pendirian program studi yang berbasis pada potensi keunggulan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk memangkas jarak kendala geografis. Dengan demikian, kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan wilayah 3T di Kalimantan dapat dieliminasi secara bertahap, sekaligus mendorong Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi secara signifikan.

Arah Kebijakan 2

Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Integritas

Mutu dan integritas adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lulusan perguruan tinggi. Arah kebijakan ini menekankan pada penguatan budaya mutu yang tertanam secara konsisten pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat perguruan tinggi, yang kemudian diselaraskan secara ketat dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui badan akreditasi.

Selain penguatan aspek akademik, kebijakan ini mengamanatkan penegakan integritas akademik yang tanpa kompromi, mencakup pemberantasan tindakan plagiarisme, penguatan etika riset, hingga penciptaan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan serta kecurangan administratif. Melalui penguatan ini, perguruan tinggi di bawah binaan LLDIKTI Wilayah XI diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keluhuran moral dan karakter kebangsaan yang kuat.

Arah Kebijakan 3

Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing

Di era kompetisi global yang berbasis pada ekonomi pengetahuan, perguruan tinggi dituntut untuk tidak lagi sekadar menjadi menara gading keilmuan, melainkan mesin penggerak inovasi. Arah kebijakan ini diarahkan untuk memacu produktivitas dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan riset-riset aplikatif, publikasi ilmiah internasional bereputasi, serta penciptaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki nilai komersial.

Peningkatan daya saing ini diakselerasi lewat penguatan ekosistem kemitraan strategis antara kampus, dunia industri, dan pemerintah daerah (triple-helix). Dengan mendorong relevansi kurikulum yang adaptif terhadap dinamika transformasi digital dan transisi ekonomi hijau, lulusan perguruan tinggi di Kalimantan akan memiliki kompetensi unggul yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja nasional maupun internasional.

Guna memastikan keberhasilan pencapaian visi besar serta menjamin keberlangsungan implementasi kebijakan Kampus Berdampak di tingkat operasional, seluruh arah kebijakan strategis tersebut tidak sekadar menjadi acuan di atas kertas, melainkan ditransformasikan secara taktis, terukur, dan tersistematis ke dalam 2 (dua) pilar kegiatan utama yang saling berintegrasi satu sama lain yaitu :

Strategi 1 : Penguatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi di LLDIKTI Wilayah XI

Kegiatan operasional ini menjadi ujung tombak pelaksanaan fungsi fasilitasi instansi yang bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan eksternal, yaitu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Kalimantan. Fokus utama dari kegiatan ini meliputi:

- Akselerasi Mutu Kelembagaan dan Akreditasi: Memberikan pendampingan terstruktur, bimbingan teknis, dan fasilitasi klinik akreditasi bagi program studi dan institusi perguruan tinggi agar mampu menaikkan peringkat akreditasinya menuju status Unggul.
- Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia: Mendorong dan menyeleksi peningkatan kapasitas dosen melalui studi lanjut, sertifikasi profesi, pemenuhan Jabatan Fungsional Akademik (JFA) hingga jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar, serta memastikan ketepatan penyaluran tunjangan profesi dan kehormatan sebagai stimulus kinerja.
- Penyelarasan Relevansi Lulusan: Memfasilitasi perluasan implementasi kebijakan kampus berdampak, memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta mendorong peningkatan persentase lulusan yang langsung terserap kerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam waktu singkat.

Strategi 2 : Penguatan Sistem Tata Kelola LLDIKTI Wilayah XI

Kegiatan operasional ini berfokus pada pembenahan internal institusi guna membangun organisasi yang lincah (agile), transparan, dan akuntabel selaku fasilitator dan pelayan publik. Ruang lingkup kegiatan internal ini mencakup:

- Transformasi Digital dan Implementasi SPBE: Modernisasi sistem administrasi perkantoran melalui sistem layanan berbasis digital terpadu yang menyederhanakan alur birokrasi pelayanan guna mewujudkan tata kelola yang cepat, efisien, dan ramah lingkungan.
- Optimalisasi Manajemen Anggaran Berbasis Outcome: Menata perencanaan keuangan dan pelaksanaan anggaran secara disiplin, memprioritaskan alokasi dana pada kegiatan-kegiatan strategis yang berdampak langsung pada indikator kinerja utama, serta mengoptimalkan tata kelola anggaran agar menjadi lebih handal dan berkualitas.
- Pengembangan Kapasitas SDM dan Akuntabilitas Kinerja: Meningkatkan profesionalisme ASN melalui pelatihan berkelanjutan, memperkuat fungsi pengawasan internal, melanjutkan pembangunan zona integritas, serta mempertahankan predikat kinerja akuntabilitas organisasi yang prima.

3.2 KERANGKA REGULASI

Adapun rancangan regulasi yang diprioritaskan bidang tugas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada periode waktu tahun 2025–2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah XI, adalah sebagai berikut :

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi UU No. 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Revisi diperlukan untuk mengatasi persoalan fragmentasi regulasi pendidikan yang terpecah dalam berbagai undang-undang	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	- Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) - Kemdikdas men	Tahun 2025
2	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Amanat UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Renduk Iptek berfungsi untuk menetapkan arah, prioritas, dan sasaran pemajuan iptek secara terintegrasi dan berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.	- Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi - Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	- Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) - BRIN	Tahun 2026 sampai dengan tahun 2027
3	Revisi Permendikbud No. 7/2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta	Perlu penyesuaian klausul tertentu agar pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi berjalan lebih tertib serta sesuai kapasitas dan kebutuhan.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	- Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) - Kementerian Kesehatan	Tahun 2026 sampai dengan tahun 2028
4	Revisi Permendikbudri stek No. 44/2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen	Menyesuaikan pengaturan dengan dinamika kebijakan pendidikan tinggi dan perkembangan profesi dosen, sehingga dapat meningkatkan kepastian karier, kesejahteraan, dan kinerja dosen dalam mendukung mutu pendidikan tinggi nasional	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	Tahun 2025
5	Revisi Permendikbudri stek No. 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Memperkuat sistem penjaminan mutu yang adaptif terhadap perkembangan iptek, kebutuhan dunia kerja, dan dinamika global, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat terjaga dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	Tahun 2025



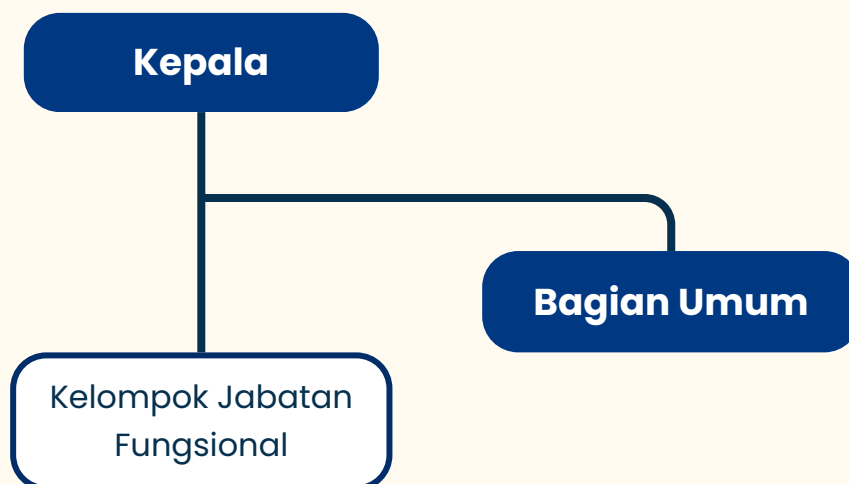
No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6	Revisi Permendikbudri steK No. 35/2021 sebagaimana diubah dengan Permendikbudri steK No. 60/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Perubahan nomenklatur kementerian dan struktur organisasi berimplikasi pada berubahnya struktur pengampu LLDikti di Kemdiktisaintek. Perlu penetapan posisi LLDikti dalam SOTK Kemdiktisaintek.	- Biro OSDM - LLDikti I – XVII	- Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	Tahun 2025
7	Rancangan Permendiktisai ntek tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi	Memperkuat tata kelola dan keberlanjutan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang selama ini telah dijalankan agar perluasan akses mahasiswa kurang mampu ke pendidikan tinggi berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.	PPAPT	Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	Tahun 2026 sampai dengan tahun 2028
8	Rancangan Kepmendiktisai ntek tentang Jabatan Akademik Dosen(peraturan turunan Permen No. 44/2024)	Dibutuhkannya peraturan teknis mengenai jabatan akademik dosen untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai jenjang karier dosen	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	- Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) - Kementerian Kesehatan	Tahun 2026 sampai dengan tahun 2028
9	Rancangan Kepmendiktisai ntek tentang Panduan Penyusunan Standar Pendidikan Tinggi(peraturan turunan Permen No. 53/2023)	Dibutuhkannya panduan penyusunan standar perguruan tinggi sebagai peraturan turunan dari Permen No. 53/2023.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	Tahun 2026 sampai dengan tahun 2028
10	Rancangan Kepmendiktisai ntek tentang IKU Perguruan Tinggi dan LLDikti	Diperlukan untuk menetapkan IKU PTN dan tugas fungsi LLDikti.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	Tahun 2026 sampai dengan tahun 2028
11	Rancangan Kepmendiktisai ntek tentang Sertifikasi Dosen	Dibutuhkannya peraturan teknis mengenai sertifikasi dosen.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)	Tahun 2026 sampai dengan tahun 2028

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi Kemdiktisaintek, LLDIKTI Wilayah XI harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada LLDIKTI secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Sejalan dengan proses utama Kemdiktisaintek, LLDIKTI Wilayah XI memiliki fungsi sebagai berikut.

- pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya
- pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya
- pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah kerjanya
- pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah kerjanya
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah kerjanya
- pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya
- pelaksanaan administrasi LLDIKTI

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, LLDIKTI Wilayah XI merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (peraturan baru belum terbit) yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Dalam hal administratif dan pembinaan LLDIKTI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, LLDIKTI Wilayah XI mempunyai struktur organisasi seperti yang tergambar pada gambar berikut :



Sumber : Lampiran II Permendikbudristek Nomor 35 tahun 2021

3.4 REFORMASI BIROKRASI

Program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sedang dijalankan oleh seluruh instansi pemerintah termasuk di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ada enam area perubahan yang perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai unit pelaksana teknis Kemdiktisaintek, LLDIKTI Wilayah XI berkomitmen untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemdiktisaintek. Komitmen besar itu ditunjukkan dengan mengupayakan agar LLDIKTI Wilayah XI dapat memperoleh predikat WBK/WBBM. Untuk merealisasikan target menjadi satuan kerja berpredikat WBK/WBBM, LLDIKTI Wilayah XI menetapkan target capaian reformasi birokrasi selama 2025–2029 yaitu :

No	Indikator Capaian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Perubahan/inovasi yang dibuat agen perubahan dan telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	Jumlah	1	2	3	4	7
2	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	%	100	100	100	100	100
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	90	92	94	96	98
4	Rata-rata kecepatan penyelesaian pengaduan masyarakat	Hari	2	2	2	1	1
5	Persentase pelayanan telah dipermudah (waktu lebih cepat, alur lebih pendek, terintegrasi dengan aplikasi)	%	90	95	97	100	100

Tabel 3.4.1 Target Reformasi Birokrasi 2025 –2029

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2025–2029 maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran untuk menggambarkan tingkat ketercapaian Sasaran tersebut. Setelah proses reviu tahunan atas renstra karena perubahan peraturan nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI, maka indikator beserta target kinerja ini telah mengalami beberapa perubahan dari target kinerja pada periode renstra sebelumnya. Sasaran dan Indikator beserta target kinerja LLDIKTI Wilayah XI dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini :

Nomenklatur	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
IKU	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	99.91	98	98.3	98.6	99
SK	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
IKU	Keunggulan layanan LLDIKTI	%	97.79	98	98.3	98.6	99
IKU	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	%	94.81	95	96	97	98
IKU	Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	%	-	85	85	90	90
SK	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
IKU	Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	%	-	95	96	97	98
IKU	Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	%	33.77	50	70	85	95
SK	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan						
IKU	Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	%	-	95	96	97	98
IKU	Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	orang	-	330	350	375	400
IKU	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS	%	-	2	2.20	2.40	2.60

Tabel 4.1.1 Target kinerja sesuai dengan Kepmendikdisaintek nomor 358/M/KEP/2025

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, setiap tahunnya LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan pendanaan Rupiah Murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pendanaan rencana strategis LLDIKTI Wilayah XI periode tahun 2025–2029 yang digunakan untuk Kegiatan-kegiatan Teknis, Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan. Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam tabel berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	77.404.296.000	82.404.296.000	87.404.296.000	92.404.296.000	97.404.296.000
2	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	53.911.451.000	54.500.000.000	55.500.000.000	57.000.000.000	59.000.000.000
Total		131.315.747.000	136.904.296.000	142.904.296.000	149.404.296.000	156.404.296.000

Tabel 4.2.2 Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah XI Tahun 2025 – 2029

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) khususnya melalui peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun Renstra secara baik dan benar karena Renstra merupakan acuan dan penunjuk arah bagi unit kerja dan organisasi didalamnya selama lima tahun ke depan.

Renstra LLDIKTI Wilayah XI 2025–2029 disusun mengacu pada Renstra Kementerian dan unit kerja eselon I atasannya. Renstra yang memuat tujuan strategis, sasaran strategis, indikator dan target kinerja serta strategi pencapaian akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara periodik selain untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang jumpai dalam upaya pencapaian target, juga untuk memastikan ketercapaian target yang ditetapkan dalam Renstra sesuai yang direncanakan. Capaian-capaian kinerja yang dihasilkan tersebut disajikan dalam dokumen kinerja berupa Laporan Kinerja Tahunan LLDIKTI Wilayah XI sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

Akhirnya, semoga Renstra 2025–2029 LLDIKTI Wilayah XI yang telah disusun, dapat memberikan kontribusi bagi penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terutama untuk LLDIKTI Wilayah XI sendiri.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA PENDANAAN TA 2025 – 2029

Nom enkl atur	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja					Alokasi (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2029	2029	2025	2026	2027	2029	2029
SK	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)											
IKU	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	99.91	98	98.3	98.6	99	53.911	54.500	55.500	57.000	59.000
SK	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)											
IKU	Keunggulan layanan LLDIKTI	%	97.79	98	98.3	98.6	99	76.404	80.404	85.904	91.404	96.404
IKU	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	%	94.81	95	96	97	98					
IKU	Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	%	-	85	85	90	90					
SK	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi											
IKU	Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	%	-	95	96	97	98	500	1.000	750	500	500
IKU	Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	%	33.77	50	70	85	95					
SK	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan											
IKU	Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	%	-	95	96	97	98	500	1.000	750	500	500
IKU	Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	orang	-	330	350	375	400					
IKU	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS	%	-	2	2.20	2.40	2.60					



LAMPIRAN 2. DEFINISI OPERASIONAL – INDIKATOR KINERJA 2025 – 2029

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 1	: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKU 1.1	: Keunggulan layanan LLDIKTI
Definisi	Layanan utama LLDIKTI Layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori: a. Layanan akademik. b. Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan. c. Layanan terkait dengan administrasi.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 1	: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKU 1.2	: Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Definisi	: Capaian dari indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain dengan total seluruh PTS di Kalimantan
Metode Penghitungan	$\frac{a + b}{t} \times 100$ a = jumlah PTS yang terakreditasi. b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: PDDIKTI dan SK Penggabungan
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan



Renstra 2025 – 2029 LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin

Program	: Pendidikan Tinggi																		
SK 1	: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)																		
IKU 1.3	: Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas																		
Definisi	Indikator ini mengukur pencapaian predikat kinerja akuntabilitas (SAKIP) serta pencapaian predikat Zona Integritas (WBK/WBBM) oleh LLDIKTI pada tahun penilaian, sebagaimana hasil evaluasi resmi dari KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek dengan memperhatikan indikator pendukung tata kelola berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.																		
	Skala dan Predikat Penilaian SAKIP:																		
	<table><tr><th>% Capaian</th><th>Kriteria</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>90-100</td><td>AA (Memuaskan)</td><td>Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.</td></tr><tr><td>80 - 89</td><td>A (Sangat Baik)</td><td>Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target</td></tr><tr><td>70 - 79</td><td>BB (Baik)</td><td>Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.</td></tr><tr><td>60 - 69</td><td>C (Cukup Baik)</td><td>Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten</td></tr><tr><td><60</td><td>CC-C (Kurang)</td><td>Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.</td></tr></table>	% Capaian	Kriteria	Keterangan	90-100	AA (Memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.	80 - 89	A (Sangat Baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target	70 - 79	BB (Baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.	60 - 69	C (Cukup Baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten	<60	CC-C (Kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.
	% Capaian	Kriteria	Keterangan																
	90-100	AA (Memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.																
	80 - 89	A (Sangat Baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target																
	70 - 79	BB (Baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.																
	60 - 69	C (Cukup Baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten																
	<60	CC-C (Kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.																
	Kriteria Zona Integritas (ZI): Zona Integritas dianggap memenuhi indikator apabila LLDIKTI berpredikat: a. WBBM (nilai tertinggi) = 100 b. WBK = 90 c. Menuju WBK = 80																		
Ketentuan a. Predikat SAKIP dan ZI yang dinilai merupakan hasil penilaian resmi KemenPANRB pada tahun berjalan. b. Predikat yang digunakan hanya yang diumumkan secara formal melalui laporan atau surat keputusan evaluasi KemenPANRB. c. Indikator dapat berbentuk pencapaian predikat (A/B/BB/BBB/CC) atau status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM).																			
Untuk output, predikat dinyatakan sah apabila terdapat bukti: a. SK Penetapan KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek; b. Laporan Evaluasi SAKIP; dan c. pengumuman resmi hasil ZI KemenPANRB.																			
Metode Penghitungan	Nilai Sakip + Nilai Zona Integritas 2 Contoh perhitungan: Diketahui Nilai SAKIP AA = 90, Nilai ZI WBK = 90 $\frac{90 + 90}{2} = 90$																		
Satuan	: Nilai																		
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif																		
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI																		
Sumber Data	: Aplikasi SPEKTA, InspirasiDikti																		
Polarisasi Indikator	: Maksimal																		
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan																		

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 2	: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKU 2.1	: Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI
Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi peningkatan mutu kepada PTS pada bidang pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kriteria Kegiatan yang termasuk dalam lingkup fasilitasi peningkatan mutu PTS oleh LLDIKTI mencakup pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, evaluasi, serta layanan konsultasi yang terdokumentasi secara resmi. Adapun PTS yang hanya menjadi peserta pasif webinar tanpa asistensi tidak dihitung sebagai fasilitasi peningkatan mutu. Ketentuan a. Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi. b. Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi. c. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu dari LLDIKTI pada tahun berjalan (pembelajaran, SPMI, atau kombinasi di antaranya) t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: Laporan pada eSAKIP
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan



Renstra 2025 – 2029 LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 2	: Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKU 2.2	: Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi
Definisi	Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi. Kriteria a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT), meliputi: 1. mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi, misalnya melalui platform Learning Management System atau opsi pengajaran lainnya; dan 2. membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa: a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek PPKPT; c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT; d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh; e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/atau f) memiliki peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi: 1. memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau 2. melakukan sosialisasi anti narkoba. c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi: 1. menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi; 2. memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi; 3. memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 4. mengimplementasikan Whistle Blowing System; dan/atau 5. memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (conflict of interest).
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: Laporan pada eSAKIP
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 3	: Meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKU 3.1	: Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI
Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada perguruan tinggi swasta (PTS) untuk peningkatan mutu layanan kemahasiswaan, termasuk pengembangan minat bakat, karier, dan prestasi mahasiswa. Kriteria Kegiatan yang termasuk fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI meliputi bimbingan teknis kemahasiswaan, pendampingan layanan karier, pembinaan minat, bakat, dan prestasi, penguatan organisasi mahasiswa, dan PPKPT. Adapun kegiatan webinar umum tidak dihitung. Ketentuan a. Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi. b. Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi. c. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu layanan kemahasiswaan dari LLDIKTI pada tahun berjalan (workshop kemahasiswaan, pembinaan prestasi, pelayanan karier, PPKPT, minat bakat, atau pendampingan standar kemahasiswaan) t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: Laporan pada eSAKIP
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan



Renstra 2025 – 2029 LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 3	: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKU 3.2	: Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya
Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengalami peningkatan jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, atau Profesor) setelah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI, seperti bimbingan teknis (bimtek) jabatan fungsional, klinik penyusunan angka kredit, pendampingan penyusunan portofolio dan dokumen kepakaran, konsultasi percepatan jabatan fungsional, serta program pembinaan SDM lainnya yang terkait dengan jabatan fungsional. Kriteria dosen yang dapat diperhitungkan dalam indikator ini yaitu: - dosen harus berasal dari PTS di wilayah kerja LLDIKTI; - mengikuti program pembinaan LLDIKTI (bimtek, pendampingan, dan sebagainya); - tercatat dalam daftar peserta dan diverifikasi oleh LLDIKTI; - mendapatkan keputusan kenaikan jabatan fungsional setelah program pembinaan; - keputusan kenaikan jabatan fungsional diterbitkan pada tahun berjalan (tahun penilaian IKU); dan - peningkatan jabatan fungsional merupakan hasil dari proses yang didampingi atau difasilitasi LLDIKTI. Ketentuan - Dosen harus mengikuti kegiatan pembinaan resmi LLDIKTI (daftar hadir dan dokumentasi tersedia). - Peningkatan jabatan fungsional harus dibuktikan dengan keputusan kenaikan jabatan fungsional yang diterbitkan pada tahun penilaian. - Kenaikan jabatan fungsional dihitung untuk semua jenjang: - dari Asisten Ahli ke Lektor; - dari Lektor ke Lektor Kepala; dan - dari Lektor Kepala ke Profesor. - Jika 1 (satu) dosen naik lebih dari 1 (satu) jenjang dalam tahun yang sama, hanya dihitung 1 (satu) kali
Metode Penghitungan	: Jumlah Dosen PTS Naik Jabatan Fungsional
Satuan	: orang
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: Laporan pada eSAKIP
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 3	: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKU 3.3	: Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kemitraan PTS
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah PTS yang menerima fasilitasi LLDIKTI dalam rangka peningkatan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, atau kemitraan tridharma melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, atau klinik peningkatan mutu yang dilaksanakan pada tahun penilaian. Kriteria Kegiatan yang termasuk dalam fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan kemitraan PTS yaitu pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, klinik peningkatan mutu, coaching clinic, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, workshop HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, serta workshop penguatan kapasitas peneliti/dosen. Ketentuan: Fasilitasi penelitian dan publikasi PTS: - PTS mengikuti fasilitasi resmi LLDIKTI (bimtek, coaching clinic, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, workshop HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan workshop penguatan kapasitas peneliti/dosen); - kegiatan dilakukan pada tahun penilaian; dan - terdapat bukti keikutsertaan atau dokumen resmi dari LLDIKTI (undangan, daftar hadir, sertifikat, laporan kegiatan, atau dokumentasi fasilitasi). Kriteria partisipasi PTS dalam fasilitasi LLDIKTI: - mengikuti minimal satu kegiatan fasilitasi penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI; - partisipasi diwakili oleh dosen tetap, bukan tenaga tidak tetap; - ada output minimal, seperti: proposal penelitian/kemitraan yang diverifikasi; outline artikel yang dibina; dan rencana aksi peningkatan kinerja penelitian atau kemitraan; dan - PTS tercatat dalam daftar penerima fasilitasi resmi LLDIKTI wilayah.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100\%$ n = jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI pada tahun penilaian t = total publikasi di seluruh PTS pada wilayah kerja LLDIKTI tersebut
Satuan	: %
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: Laporan pada eSAKIP
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan



Renstra 2025 – 2029 LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin

Program	: Dukungan Manajemen
SK 4	: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi
IKU 4.1	: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80
Definisi	Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran
Metode Penghitungan	Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan : $50\% \text{ Nilai EKA} + 50\% \text{ Nilai IKPA}$ 100% Nilai EKA diambil dari aplikasi Monev Kemenkeu Nilai IKPA diambil dari My Interest
Satuan	: Nilai
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: Monev Kemenkeu, My Interest
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

LAMPIRAN 3. POHON KINERJA LLDIKTI WILAYAH XI

